

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
NO. DAT. KE = 0075 / PER-UHP / 08
TANGGAL . 26-03-08.

**KAJIAN TENTANG PENERIMAAN DAERAH PEMERINTAH
PROPINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI



OLEH :

Nama : Radius Prawira Negara
NIM : 22 2903 056

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2007**

**KAJIAN TENTANG PENERIMAAN DAERAH PEMERINTAH
PROPINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



OLEH :

**Nama : Radius Prawira Negara
NIM : 22 2003 056**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2007**

**Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul : KAJIAN TENTANG PENERIMAAN DAERAH
PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN**

Nama : Radius Prawira Negara
NIM : 22 2003 056
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Pemerintah

**Diterima dan Disyahkan
Pada tanggal**

Pembimbing


Drs. Sunardi, SE.,M.Si.

**Mengetahui
Dekan
Ketua Jurusan Akuntansi**



Hj. Yohanis Ladewi, SE., M.Si.

03/09

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Radius Prawira Negara
NIM : 22 2003 056
Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh- sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.
Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Agustus 2007
Penulis



Radius Prawira Negara

Moto :

” Jalan untuk memperoleh keburukan itu halus dan lokasinya sangat dekat. Akan tetapi, untuk mencapai apa yang terbaik, Tuhan sudah menakdirkan bahwa manusia harus memeras keringat. Jalan untuk mencapai yang terbaik itu sempit, tinggi, jauh dan sulit dilalui. Akan tetapi, sekali Anda telah sampai di puncaknya, segala sesuatunya menjadi mudah, meskipun awalnya sangat sulit.”

(Johan Bartlett, Familiar Quotation,)

” Jika ilmu yang anda miliki tidak memberikan kebaikan bagi diri anda, maka lebih baik jika anda tidak mengetahui ilmu itu”

(ulama)

Kupersembahkan kepada :

- ❖ Bapak dan Makku
- ❖ Kak dan adekku tersayang
- ❖ Pembimbing skripsi
- ❖ Temanku terkasih
- ❖ Almamater



PRAKATA

Alhamdulillahirobbil A`lamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Kajian Tentang Penerimaan Daerah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan”**

Desentralisasi memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus daerahnya sendiri secara bertanggungjawab, sehingga untuk melaksanakan pembangunan daerahnya, mengharuskan pemerintah daerah menggali sendiri potensi yang dimiliki daerah sebagai sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai pembagunan.

Untuk melaksanakan otonomi daerah pemerintah daerah membutuhkan biaya sangat besar karena pengeluaran pemerintah semakin meningkat setiap tahun. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk membiayai biaya pembangunan dengan cara meningkatkan penerimaan daerah melalui PAD dan bantuan Pemerintah Pusat yaitu Dana Perimbangan. Tetapi semakin meningkatnya penerimaan daerah setiap tahun ini dibarengi juga meningkatnya APBD. Bahkan berdasarkan perhitungan persentase realisasi PAD dan Dana Perimbangan terhadap APBD mengalami naik turun (fluktuasi). Atas dasar itu penulis melakukan penelitian yang berjudul Kajian Tentang Penerimaan Daerah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.



Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada Bapak, Mak, Kakak, dan Adikku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Drs. Sunardi, SE., M.Si., yang telah membimbing dan memberikan pengarahannya serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang:

1. Bapak M. Idris, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.
2. Bapak Drs.H.Rosyadi, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta staf dan karyawan/karyawati.
3. Ibu Hj. Yuhanis Ladewi, SE., M.Si dan Bapak Drs. Sunardi, SE., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Nina Sabrina, SE selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak Drs. H. Johan Syafri, W, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan beserta staf dan karyawan/karyawati yang telah membantu dan memberi izin saya untuk meneliti dan mendapatkan data.
6. Terima kasih kepada kak-kak ku Ayuk Emi Suhaya, Kak Fatrolazi SE., Niksen Allfarizal, ST, Ayuk Fatimah, Kak Aljihah, ST, MT, Ayuk Alhuda, A.Md dan Adikku Meilan Belina. Yang telah banyak berkorban selama ini baik bantuan sprituil maupun meterilnya.

7. Ucapan terimakasih kepada kak ipar saya Kak Toni SH, Fardi, Ayuk Eni Mameri A.md, dan Yanti S.Pd, Irma, SE.
8. Keponakanku yang tersayang Fredi, Jefri, Cika Fani Ade Rizki, Fadel Algozali, Muhammad Raka Alfarizal, Mahammad Hafiz, Helda Febrianti, dan Reza.
9. Terima kasih atas bantuan baik srituil dan materinya selama ini dari sepupu ku Angka Wijaya SE.Ak, M.Si, Aladin SE, Ak, Raden Kusmanto ST, MM, Adiosi, SH, Drs. Donal, Budi, ST, Ayuk Rosita, SE,
10. Terimakasih atas spiritnya selama ini kepada kemenakan saya Suhardi, Ulfa Inawijaya, SE, Deka A.Md, Eti Nurafia A.Md, Elma A.Md, Yesi Arnanida A.Md, Riadi Putra A.Md
11. Teman-temanku M.Kurniawan, M Ali, Ilzam Rahmadi, Cholik Sya'ri, Agung Mulia, Rusdi, Sauban, Hairani, Riantika, Nirsa Rosita, Balkis, Dewi Yulis, Ana, Surya Aryani, Wulan, Betty, Randi, Iwan, Edwin, Sisheriadi, M. Rais, Umi, Yupi, Maryani dan Teman-teman yang tak dapat kusebutkan satu persatu.
12. Anggota Tim Penguji Komprehensif yang telah membantu saya dalam komprehensif.
13. Teman-teman KKN Desa Sukamaju Gelumbang.
14. Terimakasih kepada Lia Qomaria, AP yang telah membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin

Palembang, Agustus 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	x
HALAMAN DAFTAR TABEL	xiii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xiv
HALAMAN LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Landasan Teori	10
1. Pengertian Otonomi Daerah	10
2. Pendapatan Daerah	12
3. Pengertian PAD	12

4. Dana Perimbangan	19
5. Lain-lain Pendapatan	20
6. Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Belum Optimalnya PAD	25
7. Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Potensi PAD.....	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	30
B. Tempat Penelitian	30
C. Operasionalisasi Variabel	31
D. Data yang Diperlukan	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Analisis Data dan Teknik Analisis	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	34
1. Keadaan Unum Propinsi Sumatera Selatan	34
2. Sejarah Singkat Dispenda Propinsi Sumatera Selatan	35
3. Struktur Organisasi, Pembagian Tugas dan Fungsi	38
B. Pembahasan	45
1. Keadaan dan Perkembangan Masing-Masing Sumber Keuangan Daerah	45
2. Sumber Keuangan Daerah Yang Baru Yang Berpotensi Dapat Dikembangkan	55
3. Kendala Yang Dihadapi Dalam Rangka Mengoptimalkan Penerimaan PAD	57

4. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengelola Sumber-Sumber Keuangan Daerah	58
--	----

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	60
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel I.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	5
Tabel I.2 Realisasi Dana Perimbangan terhadap APBD	6
Tabel II.1 Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal	24
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel Pendapatan Daerah dan PAD	31
Tabel IV.2 Target dan Realisasi serta Pertumbuhan Pendapatan Daerah	46
Tabel IV.3 Target dan Realisasi serta Pertumbuhan PAD	47
Tabel IV.4 Kontribusi Masing-masing Jenis PAD serta Rata-rata kontribusi terhadap Total PAD	49
Tabel IV.5 Pertumbuhan Pajak Daerah	50
Tabel IV.6 Pertumbuhan Retribusi Daerah	51
Tabel IV.7 Pertumbuhan Laba Usaha Daerah	52
Tabel IV.8 Pertumbuhan Lain-lain PAD yang sah	53
Tabel IV.9 Target dan Realisasi serta Pertumbuhan Dana Perimbangan	54

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan	41

ABSTRAK

Radius Prawira Negara N/222003056/2007 Kajian Tentang Penerimaan Daerah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keadaan dan perkembangan masing-masing sumber keuangan daerah. Tujuannya untuk mengetahui keadaan dan perkembangan masing-masing sumber keuangan daerah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian arsip. Data yang digunakan data sekunder, teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini bermanfaat bagi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan sebagai masukan bagaimana kondisi dan perkembangan pendapatan daerah dan bermanfaat bagi pihak lain sebagai sumber informasi mengenai kajian tentang penerimaan daerah.

Hasil analisis menunjukkan persentase rata-rata pendapatan daerah selama tahun 2001-2005 sebesar 99,53% dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 18,28%. Persentase rata-rata PAD sebesar 113,42% dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 22,98%, kemudian rata-rata kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah dan pendapatan lain-lain PAD yang sah masing-masing sebesar 79,22% dan 17,57%. Rata-rata pertumbuhan masing-masing jenis PAD terbesar berasal dari laba usaha daerah 44,48% dan pajak daerah 26,26%. Persentase rata-rata pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan sebesar 104,97% dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 17,33%.

Kata Kunci: PAD, pajak daerah, retribusi, laba usaha, dana perimbangan.

yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah relatif kecilnya peranan (kontribusi) Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain, peranan/kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk sumbangan dan bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, mendominasi susunan APBD.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Sumber-sumber penerimaan daerah berdasarkan UU Nomor 53 Tahun 2004 Pasal 5 berbunyi:

- 1) Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan.
- 2) Pendapatan daerah dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - b. Dana Perimbangan.
 - c. Lain-lain Pendapatan.
- 3) Pembiayaan dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
 - b. Penerimaan pinjaman daerah
 - c. Dana cadangan daerah
 - d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Keuangan daerah merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, pemeratakan hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi selain stabilitas politik. Peran keuangan daerah makin penting, selain karena keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah berupa subsidi dan bantuan, tetapi juga karena makin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah dan pemecahannya membutuhkan partisipasi aktif masyarakat daerah. Selain itu, peranan keuangan daerah yang makin meningkat akan mendorong terwujudnya otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab.

Derajat otonomi fiskal daerah menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak daerah, retribusi, dan lain-lain. Karena itu otonomi daerah dan juga pemerintah dan pembangunan daerah bisa diwujudkan apabila disertai otonomi keuangan yang efektif. Ini berarti bahwa Pemerintah Daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap Pemerintah Pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah seperti pajak retribusi dan sebagainya.

Ciri utama suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya, maka PAD perlu ditingkatkan penerimaannya agar pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan.

dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna, serta perlu upaya sungguh-sungguh dari pemerintah daerah untuk meminimalkan ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar. Mengingat daerah memiliki potensi dan kemampuan untuk mencapai sumber-sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan di daerah.

Untuk menjalankan otonomi daerah masalah efisiensi, dan efektivitas ditinjau dari aspek sistem pengelolaan keuangan daerah memang telah banyak dilakukan diantaranya adalah (Insukindro, dkk Dalam Dasril Munir 2004:4) membahas mengenai pajak dan retribusi sebagai sumber utama PAD, menemukan bahwa pada umumnya peran retribusi daerah lebih dominan dalam menentukan besaran PAD. Sumbangan PAD terhadap total penerimaan APBD rendah, karena upaya merealisasikan peningkatan PAD tidak didasarkan pada potensi PAD, tetapi ditargetkan berdasarkan realisasi tahun sebelumnya. (Medi, dalam Dasril Munir dkk. 2004:4). Meneliti kinerja pengelolaan keuangan daerah maka pengeluaran yang tidak bermanfaat sedapat mungkin dikurangi, untuk mencapai efektivitas perlu menggali sumber-sumber pendapatan baru.

(Kuncoro, dalam Dasril Munir dkk.2004:4) mengamati masalah rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menimbulkan ketergantungan yang tinggi terhadap Pemerintah Pusat dan menganjurkan diberikan otonomi keuangan daerah yang relatif luas, sehingga daerah mampu menggali sumber-sumber keuangannya sendiri dan memanfaatkannya dengan optimal.

Untuk menjalankan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Gubernur Propinsi Sumatera Selatan, sebagai Lumbung Energi dan Pangan Nasional membutuhkan dana yang besar. Dengan demikian, maka Pemerintah Propinsi harus berupaya keras menggali dan mengembangkan potensi ekonomi secara optimal, agar sumber-sumber ekonomi tersebut dapat memberikan kontribusi yang besar untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah.

Berikut ini tabel realisasi PAD dan Dana Perimbangan, terhadap total APBD yang diperoleh dari Dispenda Propinsi Sumatera Selatan.

Tabel I.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD

Tahun	Realisasi PAD	APBD	Persentase (%)
2001	219.257.166.782,87	582.214.181.846,31	37,66
2002	289.634.625.154,34	728.025.665.693,07	39,78
2003	428.080.428.852,82	928.023.425.651,48	46,13
2004	493.132.547.174,17	1.088.213.436.390,85	45,31
2005	590.776.221.173,35	1.388.085.977.539,23	42,56
Rata-rata			42,29

(Sumber: Dispenda Propinsi Sumatera Selatan yang telah diolah)

Tabel I.2
Realisasi Dana Perimbangan terhadap APBD

Tahun	Realisasi Dana Perimbangan	APBD	Persentase(%)
2001	362.957.015.063,44	582.214.181.846,31	62,34
2002	438.391.040.538,73	728.025.665.693,07	60,22
2003	499.942.996.798,66	928.023.425.651,48	53,87
2004	575.979.889.216,68	1.088.213.436.390,85	52,93
2005	786.818.756.365,88	1.388.085.977.539,23	56,68
Rata-rata			57,21

(Sumber: Dispenda Propinsi Sumatera Selatan yang telah diolah)

Dari data di atas dapat dilihat berdasarkan secara kuantitas penerimaan PAD dan penerimaan Dana Perimbangan mengalami peningkatan setiap tahun, tetapi meningkatnya penerimaan daerah setiap tahun ini juga dibarengi meningkatnya APBD yang merupakan perwujudan dari rencana kerja keuangan tahunan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan perhitungan persentase realisasi PAD terhadap APBD tahun 2001 - 2005 mengalami fluktuasi (naik turun), seperti persentase pada tahun 2001, 2002, dan 2003 mengalami peningkatan setiap tahunnya, kemudian persentase pada tahun 2004 dan 2005 mengalami penurunan.

Persentase realisasi dana perimbangan dan APBD tahun 2001–2005 mengalami fluktuasi (naik turun), seperti pada tahun 2001 sampai dengan 2004 setiap tahunnya.



mengalami penurunan, kemudian persentase pada tahun 2004 ke 2005 mengalami peningkatan kembali. Jika kondisi persentase naik turun (fluktuasi) seperti ini, berarti menunjukkan ketergantungan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan masih cukup tinggi (tidak menentu) terhadap Pemerintah Pusat, ini tidak sesuai dengan semangat otonomi yang dicita-citakan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Kajian Tentang Penerimaan Daerah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah keadaan dan perkembangan masing-masing sumber keuangan daerah ?
- b. Apakah sumber-sumber keuangan daerah yang baru yang berpotensi dapat dikembangkan ?
- c. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan PAD?
- d. Apakah upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam mengelola sumber-sumber keuangan daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui keadaan dan perkembangan masing-masing sumber keuangan daerah.

- b. Untuk mengetahui sumber-sumber keuangan daerah yang baru yang berpotensi dapat dikembangkan.
- c. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan PAD.
- d. Untuk mengetahui upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam mengelola sumber-sumber keuangan daerah.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

a. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai sumber-sumber penerimaan daerah.

b. Bagi Dinas Pendapatan Daerah

Diharapkan dapat memberikan masukan tentang kajian penerimaan daerah.

c. Bagi Almamater

Diharapkan dapat dijadikan sebagai pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul Kajian Tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang telah dilakukan oleh Abdul Halim dan Jamal Abdul Nasir (2006), perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah 1) keadaan dan perkembangan masing-masing sumber keuangan daerah. 2) Sumber-sumber keuangan daerah yang baru yang berpotensi dapat dikembangkan. 3) Kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan PAD. 4) Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam mengelola sumber-sumber keuangan daerah. Kota Malang dalam rangka otonomi daerah ditinjau dari aspek kemampuan keuangan daerah belum mampu. PAD Kota Malang sebagian besar berasal dari pajak dan retribusi daerah. Sumber-sumber PAD yang baru yang berpotensi dapat dikembangkan adalah pajak dan retribusi daerah, karena keduanya memberikan kontribusi terhadap total PAD paling besar. Kendala-kendala yang menyebabkan belum optimalnya penerimaan PAD antara lain: (1) masih belum realistisnya dalam penentuan target PAD, hal ini karena sistem penentuan target didasarkan pada tahun sebelumnya dan belum mempunyai *data base* tentang potensi, (2) masih tinggi tingkat kebocoran dan kelolosan, hal ini karena sangat belum efektif, sarana dan prasarana belum memadai, pelayanan belum prima, (3) berkurangnya jenis objek penerimaan. Upaya - upaya yang harus dilakukan adalah upaya intensifikasi pajak dan retribusi daerah melalui memperbaiki/menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun

operasional yang meliputi : pengawasan dan pengendalian yuridis, pengawasan dan pengendalian teknis, pengawasan dan pengendalian penata - usahawan. Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD. Upaya ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dengan cara menemukan sumber pendapatan potensial yang belum dieksploitasi, yang membedakan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya terletak di dana perimbangan, karena peneliti sebelumnya tidak melakukan kajian tentang dana perimbangan.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan pelimpahan wewenang oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, dalam konteks pembangunan daerah yang berkeinginan untuk meningkatkan peran serta masyarakat daerah ditujukan dengan adanya pergeseran peran pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan dan perencanaan pembangunan daerah untuk menciptakan kemandirian daerah yang lebih besar.

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Konsep dasar otonomi daerah adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya masing-masing sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, dan pemerintah pusat membantu dan memelihara kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan di

daerah seperti masalah kebijakan moneter, pembangunan jalan antar Kota, Propinsi, maupun pemeliharaan pengairan yang melintas berbagai wilayah.

Prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan otonomi daerah yaitu:

- a. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.
- b. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas untuk diletakkan di daerah Kabupaten, Kota, dan Propinsi.

Tujuan Pembangunan Otonomi Daerah

Mardiasmo (2002:59), tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yaitu;

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Suparmoko (2002:18), adapun yang menjadi tujuan dari otonomi daerah adalah:

- a. Memberdayakan masyarakat
- b. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat
- d. Mengembangkan peran dan fungsi DPRD

2. Pendapatan Daerah

Pendapatan adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penembahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

3. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain penerimaan daerah yang sah.

Berdasarkan Undang-undang No 33 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa PAD adalah pendapatan dari suatu daerah yang keseluruhannya diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain-lain asli daerah yang sah setiap tahunnya.

Marihot P. Siahaan (2006:14), menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa PAD adalah keseluruhan penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak, retribusi daerah, bagian laba BUMD, dan penerimaan lain-lain asli daerah.

Berikut ini sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain:

a. Pajak Daerah

Marihot P. Siahaan (2006: 45), menyatakan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa

imbalan langsung yang seimbang, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari iuran yang dilakukan untuk golongan pribadi/ golongan yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Jenis-jenis pajak daerah Propinsi menurut Ahmad Yani (2006:46), terdiri dari:

- 1) Pajak kendaraan bermotor
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.

Jenis-jenis pajak daerah Propinsi berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

- 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air

- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Berikut ini penjelasan dari masing – masing jenis pajak daerah Propinsi di atas antara lain sebagai berikut:

- 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
 - a) Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
 - b) Kendaraan di atas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tetentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air.
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau

keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air.
- 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.
 - a) Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
 - b) Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.

b. Retribusi Daerah

Retribusi juga sering disebut bea daerah. Bea daerah merupakan suatu pemungutan daerah yang diperuntukan sebagai pembayaran disebabkan pemakaian atau karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah, baik jasa langsung maupun jasa diberikan secara tidak langsung.

Marihot P. Siahaan (2006:432), menyatakan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Indra Bastian dan Gatot Suepriyanto (2003:90), retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas umum yang disediakan oleh pemda bagi kepentingan masyarakat, sesuai peraturan daerah yang berlaku.

Retribusi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan

Jadi dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang merupakan salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah.

- 1) Retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan atau kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 2) Retribusi jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 3) Retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.



Pos retribusi daerah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

- a) Retribusi pengujian kapal perikanan
- b) Retribusi pemekaaian kekayaan daerah
- c) Retribusi tempat penginapan / pesanggarahan /villa dan mess
- d) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- e) Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah
- f) Retribusi penjualan produk usaha daerah
- g) Retribusi pembuangan limbah cair
- h) Retribusi analisis limbah
- i) Retribusi izin usaha perikanan
- j) Retribusi izin trayek
- k) Retribusi izin amatir radio dan izin komunikasi radio (IKRAP)
- l) Retribusi pelayanan kesehatan pada RSK paru-paru
- m) Retribusi pelayanan kesehatan pada RS jiwa daerah
- n) Retribusi pelayanan kesehatan pada RSK mata masyarakat
- o) Retribusi pembinaan & pengujian mutu hasil perikanan
- p) Retribusi izin trayek ASD&P lintas kab/kota
- q) Retribusi pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya di sungai dan danau lintas kab/kota
- r) Retribusi jasa pemeriksaan mutu kendaraan bermotor
- s) Retribusi penyelenggaraan kewenangan pemprop dibidang usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri umum serta usaha penunjang tenaga listrik

- t) Retribusi wajib latih dan iuran wajib latih tenaga kerja perusahaan
 - u) Retribusi biaya tera
 - v) Retribusi jasa pelaksanaan pengawasan sertifikat mutu barang
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai berikut:

Abdul Halim (2002:65), menyatakan bahwa bagian laba usaha merupakan penerimaan daerah yang berasal dari perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain berasal dari perusahaan daerah, penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah penjelasan pasal 4 huruf (c) menyatakan bahwa jenis-jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, anatara lain:

- 1) Bagian laba
- 2) Deviden
- 3) Penjualan saham milik daerah

- d. Lain-lain PAD yang sah

Abdul Halim (2006 : 65), menjelaskan tentang lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain hak milik pemerintah daerah.

Pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah :

- 1) Jasa giro
- 2) Sumbangan pihak ketiga

- 3) Penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TP/TGR)
- 4) Denda keterlambatan pekerjaan daerah
- 5) Angsuran cicilan / pelanggan kendaraan
- 6) Ansuran cicilan rumah dinas dan tanah
- 7) Penerimaan lain-lain

4. Dana Perimbangan

Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana perimbangan terdiri atas:

a) Dana Bagi Hasil

Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pos bagi hasil pajak antara lain:

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 3) Bagi hasil Pajak Penghasilan (pasal 21)

Pos bagi hasil bukan pajak sumber daya alam antara lain:

- 1) Iuran Hasil Hutan (IHH)
- 2) Iuran Hak Pengusaha Hutan (IHPH)
- 3) Iuran tetap *Landrent*
- 4) Iuran eksploitasi & explorasi (Royalti)

- 5) Minyak bumi
 - 6) Gas Alam
 - 7) Pemberian hak atas tanah negara
- b) Dana Alokasi Umum
- Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- Pos dana alokasi umum:
- Pos dana belanja pegawai dan non pegawai dana alokasi umum
- c) Dana Alokasi Khusus
- Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- Pos dana alokasi khusus:
- Dana pembangunan daerah/ dana reboisasi

5. Lain-lain Pendapatan

Lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat.

- a. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

- b. Dana darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan krisis solvabilitas.

Pos dana darurat:

- Bencana alam

Indikator keberhasilan otonomi daerah adalah adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadaan tersebut hanya akan tercapai apabila lembaga sektor publik dikelola dengan memperhatikan *value for money* (VFM). Konsep VFM tersebut penting bagi pemerintah sebagai pelayanan masyarakat, karena implementasi konsep tersebut memberikan manfaat:

1. Efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan tepat sasaran
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik
3. Biaya pelayanan yang murah karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan *resources*
4. Alokasi belanja lebih berorientasi pada kepentingan publik
5. Meningkatkan *public cost awareness* sebagai pelaksanaan pertanggungjawaban public

Keputusan Mendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang dimaksud dengan:

1. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang,

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah
3. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan kas daerah
4. Penerimaan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
5. Lain-lain pendapatan adalah terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat

(Rejo, dalam Abdul Halim dan Jamal Abdul Nasir 2006 : 43), menyatakan bahwa, posisi sentral keuangan daerah dalam pemerintah di daerah juga menunjukkan posisi tingkat keotonomian suatu daerah, karena dengan kemampuan keuangan daerah, pemerintah daerah dapat dinyatakan mampu atau tidak mengurus rumah tangganya sendiri, dengan kata lain bahwa pemerintah daerah dapat menjalankan fungsinya dalam rangka otonomi secara baik apabila mempunyai sumber-sumber keuangan yang cukup.

Mahi (2002:58-59), pendapatan asli daerah belum bisa diandalkan sebagai sumber pembiayaan utama otonomi daerah disebabkan oleh beberapa hal berikut:

1. Relatif rendahnya basis pajak/retribusi daerah
2. Pajak/retribusi yang ditetapkan untuk daerah Propinsi, Kabupaten atau Kota memiliki basis pungutan yang relatif kecil dan sifatnya bervariasi antar daerah.

3. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah

Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan pusat dalam bentuk bantuan dan subsidi. Dari segi upaya pungutan pajak, banyak bantuan subsidi ini mengurangi usaha daerah dalam pemungutan pendapatan asli daerahnya, dan daerah lebih mengandalkan kemampuan negosiasinya terhadap pusat untuk memperoleh tambahan bantuan.

4. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah masih rendah

Pemungutan pajak di daerah cenderung dibebani dengan biaya pungut yang besar dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah ditetapkan berdasarkan target. Akibatnya beberapa daerah lebih condong memenuhi target, walaupun dari segi pertumbuhan ekonomi sebenarnya pemasukan pajak dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

5. Kemampuan perencanaan dan pengawasan yang lemah

Pemungutan pajak selalu mengalami kebocoran-kebocoran yang cukup besar, sebagai dampak dari lemahnya kemampuan aparat perencanaan dan pengawasan keuangan.

Kemandirian keuangan daerah seyogyanya tidak diartikan bahwa setiap pemerintah daerah otonom harus dapat membiayai seluruh keperluan dari penerimaan PAD, meskipun demikian rasio antara PAD dengan Total Penerimaan Daerah (TPD) tetap merupakan salah satu indikator derajat desentralisasi fiskal suatu daerah (Kuncoro, dalam Dasril Munir dkk. 2004:106). Tingkat kemandirian fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dapat dipelajari dengan melihat ada besarnya derajat desentralisasi fiskal suatu daerah. Pengukuran derajat

desentralisasi fiskal dapat dilakukan melalui analisis rasio. Smith dan Uppal, derajat desentralisasi fiskal dapat diukur dengan menghitung: (a) rasio PAD terhadap TPD; (b) rasio sumbangan dan bantuan terhadap TPD (Ahmad, dalam Dasril Munir dkk.2004:106), sedangkan (Reksohadiprojo, dalam Dasril Munir dkk.2004: 106), menjelaskan bahwa untuk derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah digunakan ukuran: (a) rasio PAD terhadap TPD; (b) rasio BHPBP terhadap TPD; (c) rasio sumbangan dan bantuan (SB) terhadap TPD.

Derajat desentralisasi fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan TPD, menurut hasil penemuan tim fisipol UGM menggunakan skala interval yang terlihat dalam tabel berikut:

Tabel II. 1
Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD/TPD(%)	Kemampuan Keuangan Daerah
00 – 10,00	Sangat Kurang
10.01 – 20.00	Kurang
20.01 – 30.00	Cukup
30.01 – 40.00	Sedang
40.01 – 50.00	Baik
> 50.00	Sangat Baik

(Sumber: Tim Fisipol UGM, dalam Dasril Munir dkk.)

(Kristiadi, dalam Abdul Halim dan Jamal Abdul Nasir 2006:44) menyarankan agar sumber-sumber pembiayaan ideal berkaitan dengan PAD, maka: 1) PAD seyogyanya lebih dititik beratkan pada ekstensifikasi dan intensifikasi sumber - sumber retribusi. Hal ini mengingat bahwa retribusi sangat berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat, dengan demikian diharapkan dapat sekaligus memacu peningkatan pelayanan. 2) Pajak-pajak



daerah cukup ditetapkan secara limitatif pada objek – objek yang cukup potensial, bagi pajak yang kurang potensial seyogyanya dihapuskan.

Usaha-usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber, (Rejo, dalam Abdul Halim dan Jamal Abdul Nasir 2006:43), sangat tergantung pada kreativitas aparatur pemerintah daerah untuk mampu mengkoordinasikan lembaga-lembaga penghasil sumber PAD dan kreativitas aparatur tentunya sangat ditentukan oleh kualitas aparatur. Kebijakan dan usaha intensifikasi adalah berupa peningkatan PAD dari sumber-sumber yang telah ada saat ini. Kebijakan dan usaha ekstensifikasi adalah berupa mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dalam batas ketentuan perundang-undangan.

6. Identifikasi faktor-faktor penyebab belum optimalnya Pendapatan Asli

Daerah dapat diklasifikasikan:

a. Faktor penyebab langsung

adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi secara langsung terhadap pencapaian sasaran, oleh karena itu apabila faktor ini diatasi, maka akan mempunyai pengaruh langsung terhadap pencapaian sasaran.

Faktor-faktor ini meliputi:

- 1) Masih belum realistisnya di dalam penentuan target
- 2) Masih tingginya tingkat kebocoran dan kelolosan
- 3) Berkurangnya jenis objek penerimaan

b. Faktor penyebab tidak langsung

Adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi secara tidak langsung terhadap pencapaian sasaran, oleh karena itu apabila faktor ini diatasi maka tidak akan mempunyai pengaruh langsung terhadap pencapaian

sasaran, namun akan mempunyai pengaruh kepada akibat yang disebabkan oleh faktor penyebab yang diatasi tersebut.

Faktor-faktor ini meliputi:

- 1) Sistem penentuan target yang didasarkan pada data historis
- 2) Belum efektifnya pemberlakuan sanksi
- 3) Pelayanan operasioanal di lapangan masih belum dilaksanakan secara prima
- 4) Terbatasnya sumberdaya atau petugas pelaksana operasioanal di lapangan
- 5) Adanya birokrasi dalam pelayanan pengumutan pajak dan retribusi
- 6) Kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional di lapangan
- 7) Belum efektifnya sistem pengendalian dan pengawasan di lapangan
- 8) Belum dimilikinya data dasar mengenai potensi sumber penerimaan.

7. Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Potensi PAD

a. Upaya Intensifikasi

Adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti (Dedy, dalam Abdul Halim dan Jamal Abdul Nasir 2006:50), dalam upaya intensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek personalianya, yang pelaksanaannya meliputi :

- 1) Memperbaiki atau menyesuaikan aspek kelembagaan/organisasi pengelolaan PAD (DISPENDA), berikut perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang berkembang, yaitu dengan cara menerapkan secara

optimal sistem dan prosedur Manual Administrasi Pendapatan Daerah (MAPATDA), dengan berlakunya sistem MAPATDA, organisasi Dispenda yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang pendapatan daerah, tidak lagi berorientasi pada sektor/bidang pungutan (*by object*) tetapi berorientasi pada fungsi-fungsi (*by function*) dalam organisasinya, yaitu fungsi pendaftaran dan pendataan, fungsi penetapan, fungsi pembukuan dan pelaporan, fungsi penagihan serta fungsi perencanaan dan pengendalian operasional, sehingga:

- a) Dengan orientasi pada kegiatan fungsi-fungsi dalam organisasi dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat, sehingga pola organisasi lebih terarah
 - b) Sistem pengawasan menjadi lebih baik
 - c) Memberikan dampak kepada arah peningkatan PAD, karena sistem ini dapat mendorong terjadinya:
 - (1) Peningkatan jumlah wajib pajak dan retribusi daerah
 - (2) Peningkatan cara-cara penetapan pajak dan retribusi
 - (3) Peningkatan pemungutan pajak dan retribusi dalam jumlah yang benar dan tepat waktu
 - (4) Peningkatan sistem pembukuan, sehingga memudahkan dalam hal pencarian data tunggakan pajak maupun retribusi yang pada akhirnya dapat mempermudah penagihannya
- 2) Memperbaiki/menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi:

- a) Penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan
 - b) Penyesuaian tarif
 - c) Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan
- 3) Peningkatan pengawasan dan pengendalian, bagaimanapun baiknya perencanaan jika tidak disertai dengan pengawasan dan pengendalian yang efektif bisa saja terjadi kebocoran-kebocoran. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian yang meliputi:
- a) Pengawasan dan pengendalian yuridis, dalam hal ini, perlu diteliti apakah pungutan PAD (khususnya pajak dan retribusi) tersebut telah berdasarkan undang-undang atau peraturan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang ada
 - b) Pengawasan dan pengendalian teknis, dalam hal ini menitik beratkan pada pelaksanaan pemungutan dengan sasaran menyempurnakan sistem dan prosedur pungutan dan pembayaran serta peningkatan pelayanan yang cepat dan cermat kepada wajib pajak/retribusi, misalnya apakah sistem pembayaran tidak menyulitkan wajib pajak/retribusi atau apakah perlu dilakukan pembayaran ditempat.
 - c) Pengawasan dan pengendalian penata-usahaan, dalam hal ini lebih ditujukan pada kegiatan para pelaksana dan ketertiban administrasi.
- 4) Peningkatan sumberdaya manusia pengelola PAD, dalam hal ini dapat dilakukan antara lain dengan mengikut sertakan aparatnya dalam kursus keuangan daerah, juga program-program pendidikan dan

pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah kolaborasi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang kompeten

- 5) Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, baik langsung maupun melalui media radio, televisi atau selebaran, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak maupun retribusi

b. Upaya Ekstensifikasi

(Dedy, dalam Abdul Halim dan Jamal Abdul Nasir 2006:50) ekstensifikasi PAD adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber PAD yang baru, namun tidak bertentangan dengan kebijakan pokok nasional, yakni pungutan pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan daerah berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan bagi masyarakat

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2002:29), jenis penelitian berdasarkan jenis data yang diteliti dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Penelitian opini

Penelitian opini adalah penelitian terhadap fakta berupa opini atau pendapat orang (responden).

2. Penelitian empiris

Penelitian empiris adalah penelitian terhadap fakta empiris yang diperoleh berdasarkan observasi atau pengalaman

3. Penelitian arsip

Penelitian arsip adalah penelitian terhadap fakta yang tertulis (dokumen) atau berupa arsip data

Penelitian ini adalah jenis penelitian arsip, karena dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap fakta yang berupa dokumen atau arsip data tentang Pendapatan Asli Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan di jalan POM IX Palembang.

C. Operasionalisasi Variabel

Tabel III. I
Operasionalisasi Variabel Pendapatan Daerah, dan PAD

No.	Variabel	Definisi	Indikator
1	Pendapatan daerah	Semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan	- PAD - Dana perimbangan - lain-lain pendapatan.
2	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	- pajak daerah, - retribusi daerah - laba usaha yang - pendapatan lain-lain yang sah.

(Sumber : Penulis)

D. Data yang Diperlukan

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2002:146), data terdiri dari:

a. Data Primer

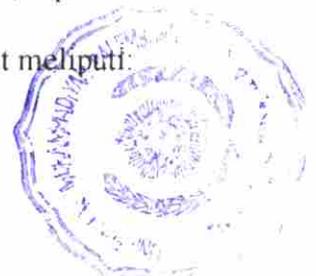
Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang atau pihak lain)

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan. Data tersebut meliputi:

1. Data anggaran dan realisasi PAD (dari tahun 2001 s/d 2005)



2. Data anggaran dan realisasi dana perimbangan (dari tahun 2001 s/d 2005)
3. Data anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah (dari tahun 2001 s/d 2005)

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data Nan Lin Alih Bahasa W. Gulo (2002:116) terdiri dari:

1. Pengamatan (observasi)

Pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

2. Survei

Survei adalah pengumpulan data dengan menggunakan instrumen untuk meminta tanggapan responden tentang sampel.

3. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden, komunikasi langsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka.

4. Kuesioner dan angket

Kuesioner disusun dalam kalimat tanya sedangkan angket disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan

5. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu lalu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Sugiyono (2003:14), terdiri dari:

- a. Kualitatif yaitu analisi yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata, kalimat, dan gambar.
- b. Kuantitatif yaitu analisis yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif dan kualitatif.

2. Teknik Analisis

Adapun langkah-langkah teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan cara sebagai berikut:

- a. Menganalisis terjadinya selisih antara anggaran dan realisas pendapatan daerah, serta pertumbuhannya.
- b. Menganalisis terjadinya selisih antara anggaran dan realisasi PAD, serta pertumbuhannya.
- c. Menganalisis pertumbuhan PAD perjenis objek penerimaan.
- d. Menganalisis kontribusi masing-masing jenis objek dalam PAD terhadap PAD itu sendiri.
- e. Menganalisis terjadinya selisih antara anggaran dan realisasi Dana Perimbangan, serta pertumbuhannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Keadaan Umum Propinsi Sumatera Selatan

Propinsi Sumatera Selatan terletak antara $1^{\circ} - 4^{\circ}$ LS dan $102^{\circ} - 108^{\circ}$ BT dengan luas daerah seluruhnya 109.254 Km atau 10.925.400 hektar.

Daerah ini berbatasan dengan:

- Daerah utara berbatasan dengan Propinsi Jambi
- Daerah selatan berbatasan dengan Propinsi Lampung
- Daerah timur berbatasan dengan Propinsi Bangka Belitung dan Laut Jawa
- Daerah barat berbatasan dengan Propinsi Bengkulu

Kondisi topografi daerah yang cukup beragam, dipantai timur terdiri dari rawa-rawa dan air payau yang dipengaruhi oleh pasang surut air vegetasinya berupa tumbuhn palmase dan kayu rawa (bakau). Makin ke daerah barat merupakan daerah dataran rendah dan lemba yang luas seperti lemba musi, ogan, komering dan lematang. Lebih kedalam tanahnya semakin tinggi yang merupakan daerah perbukitan yang puncaknya cukup tinggi seperti gunung semening (1.964 M), gunung dempo (3.159M), gunung patah (1.107M) dan gunung bungkok (2.125M), dan disebelah bukit barisan terdapat daerah perkebunan/ pertanian teutama kopi, teh, dan sayur-sayuran.

2. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan

Sejalan dengan fungsinya Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Dati I Sumatera Selatan adalah merupakan Dinas Daerah TK I yang khususnya mengemban tugas untuk mengelola sumber pendapatan daerah dalam upaya pemerintah daerah untuk menghimpun dana dalam melaksanakan tugas-tugas pembantu di daerah.

Sehubungan dengan itu menunjang usaha-usaha pembangunan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, perlu mengadakan upaya –upaya untuk mengembangkan dan mengintensifkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga dengan demikian pemungutan pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan secara lebih intensif guna mencapai target pendapatan daerah yang telah ditetapkan.

Pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah pada mulanya hanya diurus dan dilaksanakan oleh salah satu bagian dilingkungan Sekretariat Wilayah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, seperti diatur dalam surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No.PD/93/1970 Tanggal 6 Mei 1970.

Sejalan dengan pesatnya perkembangan pembangunan di daerah Propinsi Sumatera Selatan yang tentunya diikuti oleh peningkatan pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan tersebut, maka itu dibentuklah Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan yang berdasarkan Perda No. 9 Tahun 1973/1974 Tanggal 14 Juli 1973 setelah itu untuk pembangunan selanjutnya maka pada Tahun 1979 dibentuklah Perda No. 4 Tahun

1979 yang menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2000 mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain sebagai koordinator di bidang Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera sedangkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan bertugas melakukan pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak daerah Propinsi, untuk tugas sebagai koordinator Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan telah melakukan koordinasi dengan dinas-dinas/instansi pemungutan pendapatan daerah lainya dalam hal mengupayakan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) inapun Pendapatan Daerah (PATDA).

a. Visi dan Misi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi, yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1) Visi

Mewujudkan Pendapatan Asli Daerah sebagai potensi utama mendukung otonomi Propinsi Sumatera Selatan yang bersatu teguh.

2) Misi

- a) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal
- b) Meningkatkan motivasi kepada masyarakat terhadap upaya pembangunan melalui pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah
- c) Meningkatkan peran aktif dinas/instansi terkait dibidang pemungutan

- d) Penggalian sumber-sumber penerimaan baru
- e) Meningkatkan pendapatan daerah

b. Tujuan dan Sasaran

Perumusan dan menetapkan tujuan dan sasaran merupakan hasil kajian yang dilakukan dari misi, dan sebagai arah dalam upaya mencapai hasil yang telah ditetapkan. Dalam rangka mencapai misi sebagaimana yang telah dikemukakan maka rumusan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1) Tujuan

- a) Terwujudnya pendapatan daerah sebagai potensi utama dalam pembangunan daerah
- b) Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang berkesinambungan secara prima dan tepat waktu
- c) Terciptanya budaya masyarakat yang sadar terhadap hak dan kewajiban dibidang pajak dan retribusi daerah
- d) Berkembangnya sumber daya manusia dibidang pelayanan secara profesional Terciptanya organisasi yang berorientasi ke masa depan

2) Sasaran

- a) Meningkatkan pendapatan daerah
- b) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah
- c) Meningkatkan kualitas aparat pelayanan
- d) Meningkatkan sarana dan prasarana operasional pemungutan pajak dan retribusi daerah
- e) Tersedianya sistem pelayanan komputerisasi

- f) Meningkatnya kerjasama dengan pihak ketiga
- g) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait
- h) Meningkatkan operasional pemungutan melalui pemberdayaan masyarakat BUMD/BUMN dan swasta
- i) Meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan

3. Struktur Organisasi. Pembagian Tugas dan Fungsi

Struktur organisasi menunjukkan tentang struktur dan tanggung jawab secara wewenang, secara formal setiap fungsi organisasi adalah proses berstruktur tempat orang berorientasi untuk mencapai tujuan organisasi, sedangkan untuk menunjukkan tugas dan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pegawai agar tidak saling tumpang tindih diperlakukan suatu struktur organisasi.

Struktur organisasi melukiskan interaksi kegiatan, peran, hubungan, tujuan dan sifat-sifat organisasi lainnya, tetapi diingat juga bahwa peranan struktur pada setiap jenis organisasi ternyata berlainan dalam tingkat dan kualitasnya.

Berikut ini struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 241 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Berikut ini penjelasan masing-masing tugas dan fungsi struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah:

BAB II URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Kepala Dinas Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekosentrasi di bidang pendapatan daerah

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 keputusan ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja
- b. Pelaksanaan meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah
- c. Pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang usaha umum, kepegawain, perlengkapan dan keuangan.
- d. Pengkoordinasian yang meliputi segala gerak yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah
- e. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atau pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur serta

peraturan perundang-undangan yang berlaku

- f. Pembinaan unit pelaksanaan teknis dinas

Bagian Kedua
Wakil Kepala Dinas
Pasal 4

Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan kewenangan desentralisasi dan tugas dekosentrasi di bidang pendapatan daerah

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 keputusan ini, Wakil Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pengawasan kedalam
- b. Pelaksanaan mewakili Kepala Dinas, bila Kepala Dinas tidak ada di tempat
- c. Penandatanganan naskah dinas yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas
- d. Penandatanganan administrasi bidang kepegawaian, keuangan dan pembangunan sesuai dengan pelimpahan dari Kepala Dinas

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha
Pasal 6

Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, hukum , organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta keuangan

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 6 keputusan ini, bagian tata usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, hukum, organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan latihan
- c. Pelaksanaan urusan tata usaha keuangan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

**Bagian Keempat
Subdinas Pajak
Pasal 8**

Subdinas pajak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah di bidang pendataan, pengenaan, penerimaan dan keberatan dibidang pajak

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 keputusan ini, subdinas pajak mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan teknis administrasi pungutan, pengumpulan data dan pemasukan pajak daerah berdasarkan kebijaksanaan dinas
- b. Melaksanakan pembukuan dan laporan mengenai penetapan, pembayaran, dan tunggakan pajak daerah
- c. Melaksanakan kegiatan administrasi yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa pajak

**Bagian Ketima
Subdinas Retribusi
Pasal 10**

Subdinas Retribusi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah di bidang pemungutan meliputi pengenaan penerimaan dan pembukuan di bidang retribusi.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Keputusan ini, Subdinas Retribusi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan teknis administrasi pungutan, koordinasi dan pengawasan, administratif di bidang pungutan retribusi daerah berdasarkan kebijaksanaan dinas
- b. Pelaksanaan kegiatan koordinasi, pembinaan dan bimbingan teknis pungutan retribusi daerah
- c. Pembukuan dan pelaporan mengenai hasil retribusi daerah, pendapatan dinas– dinas Propinsi

Bagian Keenam Subdinas Pendapatan lain – lain Pasal 12

Subdinas pendapatan lain-lain mempunyai tugas-tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah di bidang pemungutan meliputi pengenaan, penerimaan di bidang pendapatan lain-lain.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 keputusan ini, Subdinas Pendapatan lain-lain mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan teknis administrasi pungutan, koordinasi dan pembinaan administrasi di bidang pemungutan lain -lain pendapatan daerah
- b. Pembukuan dan laporan mengenai penerimaan lain

Bagian Ketujuh
Subdinas Pengawasan dan Pembinaan
Pasal 14

Subdinas Pengawasan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah di bidang pengawasan meliputi teknis administrasi dan operasional, keuangan, barang dan kepegawaian.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Keputusan ini Subdinas Pengawasan dan Pembinaan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengawasan di bidang keuangan dan kepegawaian dilingkungan Dinas pendapatan Daerah
- b. Pelaksanaan pengawasan di bidang material di lingkungan Dinas Propinsi dan Unit pelaksana Teknis Dinas
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis administrasi dan operasional pelaksanaan pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Subdinas Perencanaan dan Pengembangan
Pasal 16

Subdinas perencanaan dan pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah di bidang pengumpulan dan pengolahan data, koordinasi penyusunan program, perencanaan, pengembangan dan penggalian pendapatan daerah.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Keputusan ini, Subdinas perencanaan dan pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan penelitian, perencanaan, penyusunan rumusan kebijaksanaan dinas, program kerja, usaha pengembangan dan penggalan sumber pendapatan daerah
- b. Pelaksanaan kegiatan dokumentasi, pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data pengembangan
- c. Penghimpun, penyiapan dan perumusan bahan-bahan rancangan Peraturan Daerah, Surat Keputusan Gubernur dan ketentuan lain di bidang pendapatan daerah
- d. Pembuatan bentuk formulir dan laporan kegiatan yang diperlukan dalam pemungutan pendapatan daerah.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan tentang penerimaan daerah dari tahun 2001-2005, maka penulis menganalisis target dan realisasi serta pertumbuhan sumber-sumber penerimaan daerah tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Keadaan dan perkembangan masing-masing sumber Keuangan daerah

a. Target dan Realisasi serta Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2001-2005

Berikut ini tabel IV.2 target dan realisasi serta pertumbuhan pendapatan daerah Propinsi Sumatera Selatan dari tahun 2001-2005, berdasarkan realisasi menunjukkan pendapatan daerah mengalami peningkatan setiap tahun.

Tabel IV.2
Target dan Realisasi serta Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Propinsi Sumatera Selatan
2001 – 2005

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Pertumbuhan (%)
2001	527.915.156.000,00	582.214.181.846,31	90,67	
2002	671.850.122.000,00	728.025.665.693,07	92,28	25,04
2003	843.341.754.000,00	928.023.425.651,48	110,04	21,55
2004	1.173.820.192.147,00	1.088.213.436.390,85	92,71	17,26
2005	1.239.630.291.560,00	1.388.085.977.539,23	111,97	27,55
Rata – rata			99,53	18,28

(Sumber : Dispenda Propinsi Sumatera Selatan yang telah diolah)

Memperhatikan tabel IV.2 di atas, maka akan tampak pencapaian target pendapatan daerah Propinsi Sumatera Selatan dari tahun 2001-2005 rata-rata sebesar 99,53%. Pencapaian target terendah diperoleh tahun 2001 (90,67%) ini dikarenakan tidak tercapai target penerimaan daerah dari beberapa pos seperti retribusi daerah yang hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 81,48%, dan pos bagi hasil bukan pajak sumber daya alam sebesar 96,74%, sedangkan pencapaian target tertinggi diperoleh tahun 2005 (111,97%) tercapainya target ini dikarenakan penerimaan dari pajak daerah dan dana perimbangan melampaui dari target yang dianggarkan masing-masing sebesar (109,24%), (118,78%), dan pertumbuhan realisasi pendapatan daerah menunjukkan naik turun (fluktuasi), dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 18,28%, pertumbuhan tertinggi pada tahun 2005 sebesar 27,55% tingginya pertumbuhan ini dikarenakan meningkat penerimaan yang berasal dari PAD dan dana perimbangan lebih besar dari pada tahun sebelumnya peningkatannya mencapai Rp 299.872.541.148,38.

Pertumbuhan terendah pada tahun 2004 (17,26%) rendahnya pertumbuhan ini dikarenakan tidak tercapainya target pendapatan yang berasal dari pajak daerah (96,78%), retribusi daerah (77,83%), laba usaha daerah (52,29%) dan pendapatan lain-lain (39,37%), sedangkan pencapaian realisasi pendapatan daerah meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 160.190.010.739,37

b. Target dan Realisasi PAD serta pertumbuhannya

Berikut ini tabel IV.3 target dan realisasi serta pertumbuhan PAD Propinsi Sumatera Selatan dari tahun 2001-2005, tabel ini akan memperlihatkan besarnya persentase pencapaian target penerimaan pemerintah dari sumber-sumber PAD.

Tabel IV.3
Target dan Realisasi serta Pertumbuhan PAD
Propinsi Sumatera Selatan
Tahun 2001 – 2005

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Pertumbuhan (%)
2001	165.308.497.000,00	219.257.166.782,87	132,64	
2002	232.450.267.000,00	289.634.625.154,34	124,07	32,09
2003	339.950.449.000,00	428.080.428.852,82	125,92	47,80
2004	614.782.613.047,00	493.132.547.174,17	80,21	15,20
2005	566.730.452.778,00	590.776.221.173,35	104,24	19,80
Rata – rata			113,42	22,98

(Sumber: Dispenda Propinsi Sumatera Selatan yang telah diolah)

Memperhatikan tabel IV.3 di atas tampak bahwa pencapaian target PAD Propinsi Sumatera Selatan dari tahun 2001 – 2005 rata-rata 113,42% (melampaui dari yang dianggarkan). Pencapaian target terendah diperoleh tahun 2004 (80,21%), rendahnya pencapaian target ini dikarenakan dari 7 jenis pajak daerah, tetapi 5 jenis diantaranya tidak mampu mencapai dari target yang dianggarkan.



Pada tahun 2004 dalam rangka menghadapi PON XVI pemerintah Propinsi Sumatera Selatan berusaha untuk meningkatkan pendapatan dari pos retribusi daerah, laba usaha daerah, dan Lain-lain PAD yang sah, tetapi dari seluruh target yang ditetapkan tidak tercapai, sedangkan pencapaian target tertinggi diperoleh tahun 2001 (132,64%), ini dikarenakan pos lain-lain PAD yang sah, pos pajak daerah, dan pos laba usaha daerah mampu memberikan kontribusi masing-masing sebesar (320,31%), (115,28%), dan (108,36%), tetapi bila dilihat dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan pencapaian target mengalami naik turun, meskipun realisasi PAD tahun 2004 meningkat, tetapi pertumbuhan turun sebesar (15,20%) ini dikarenakan meningkat pencapaian realisasi PAD sebesar Rp 65.052.118.321,35, sedangkan pencapaian target pertumbuhan tertinggi pada tahun 2003 (47,80) ini dikarenakan selisih pencapaian target realisasi PAD sangat besar mencapai Rp 138.445.803.698,48.

c. Kontribusi masing-masing jenis PAD terhadap total PAD

Berikut ini tabel IV.4 yang memperlihatkan besarnya kontribusi masing-masing jenis PAD terhadap total PAD itu sendiri pertahunnya serta rata-rata kontribusi PAD dari tahun 2001-2005.

Tabel IV.4
Kontribusi Masing-masing Jenis PAD serta Rata-rata Kontribusi
Terhadap Total PAD Propinsi Sumatera Selatan
2001 – 2005

No	Jenis	Tahun 2001 (Rp)	Kontribusi (%)	Tahun 2002 (Rp)	Kontribusi (%)	Tahun 2003 (Rp)	Kontribusi (%)	Tahun 2004 (Rp)	Kontribusi (%)	Tahun 2005 (Rp)	Kontribusi (%)	Rata-rata Kontribusi %
1	Pajak Daerah	164.856.086.130,62	75,19	225.791.644.233,27	77,96	310.116.186.303,66	72,44	413.657.152.755,87	83,90	511.334.751.629,64	86,60	79,22
2	Retribusi Daerah	3.445.473.774,00	1,57	3.034.488.584,20	1,05	3.200.596.453,49	0,74	4.707.560.999,67	0,90	4.011.299.822,73	0,70	0,99
3	Laba usaha daerah	3.556.084.218,05	1,62	4.204.488.368,42	1,45	10.493.750.610,00	2,45	13.695.673.962,00	2,80	16.995.270.899,66	2,80	2,22
4	Pendpt. Lain-aun PAD yang sah	47.399.522.660,20	21,62	56.604.003.968,15	19,54	104.323.915.505,67	24,37	61.072.159.456,63	12,40	58.434.898.821,32	9,90	17,57
Total		219.257.166.782,87	100	289.634.625.154,34	100	428.080.428.852,82	100	493.132.547.174,17	100	590.776.221.173,35	100	100

(Sumber : Dispenda Propinsi Sumatera Selatan yang telah diolah)

Memperhatikan tabel IV.4 tampak bahwa kontribusi masing-masing jenis PAD terhadap total PAD Propinsi Sumatera Selatan dari tahun 2001-2005 menunjukkan bahwa pajak daerah memberikan kontribusi terbesar, yaitu rata-rata sebesar 79,22%, ini dikarenakan dari tahun 2001-2005 ada 7 jenis pajak daerah, tetapi ada 3 jenis pajak daerah setiap tahun selalu memberikan kontribusi yang besar diantaranya: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBN-KB), dan Pajak Kendaraan Bahan Bakar Bermotor (PBB-KB), kemudian disusul oleh lain-lain PAD yang sah rata-rata 17,57% kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2001 dan 2002 masing-masing sebesar 320,31% dan 113,15%, selanjutnya laba perusahaan daerah 2,22%.

d. Pertumbuhan masing-masing jenis PAD

Berikut ini tabel IV.5 yang memperlihatkan pencapaian pertumbuhan pajak daerah setiap tahun dan rata-rata pertumbuhannya dari tahun 2001-2005.

Tabel IV.5
Pertumbuhan Pajak Daerah Propinsi Sumatera Selatan
Tahun 2001 – 2005

Tahun	Pajak Daerah	Pertumbuhan (%)
2001	164.856.086.130,62	
2002	225.791.644.233,27	36,96
2003	310.116.186.303,66	37,35
2004	413.657.152.755,87	33,38
2005	511.334.751.629,64	23,61
Rata – rata		26,26

(Sumber :Dispenda Propinsi Sumatera Selatan yang telah diolah)

Berdasarkan tabel IV.5 di atas tampak, selama tahun 2001-2005 menunjukkan pertumbuhan pajak daerah Propinsi Sumatera Selatan secara rata-rata sebesar 26,26%.Tingkat pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2003 (37,35%), tingginya tingkat pertumbuhan ini dikarenakan dari 6 jenis pajak daerah

5 jenis diantaranya dapat memenuhi target yang ditetapkan, tetapi hanya satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi sebesar 1,64% yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Atas Air, sedangkan tingkat pertumbuhan terendah pada tahun 2005 (23,61%), rendahnya tingkat pertumbuhan ini dikarenakan dari 7 jenis pajak daerah, tetapi hanya 2 jenis pajak daerah dapat mencapai dari target yang ditetapkan

Berikut ini tabel IV.6 yang memperlihatkan pencapaian pertumbuhan retribusi daerah setiap tahun dan rata-rata pertumbuhannya dari tahun 2001-2005.

Tabel IV.6
Pertumbuhan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Selatan
Tahun 2001-2005

Tahun	Retribusi Daerah	Pertumbuhan (%)
2001	3.445.473.774,00	
2002	3.034.488.584,50	-11,93
2003	3.200.596.433,49	5,47
2004	4.707.560.999,67	47,08
2005	4.011.299.822,73	-14,79
Rata – rata		5,16

(Sumber : Dispenda Propinsi Sumatera Selatan yang telah diolah)

Berdasarkan tabel IV.6 di atas tampak, selama periode 2001-2005 menunjukkan tingkat pertumbuhan rata-rata retribusi daerah Propinsi Sumatera Selatan sebesar 5,16%. Tahun 2004 untuk meningkat penerimaan yang berasal dari retribusi daerah, pemerintah menambah jumlah jenis retribusi daerah yang sebelumnya berjumlah 23 jenis menjadi 44 jenis dengan tingkat pertumbuhan tertinggi sebesar (47,08%), meskipun tahun 2005 untuk meningkat penerimaan dari retribusi daerah dengan memperbanyak jenis retribusi menjadi 63 jenis, tetapi tetap saja tidak mampu memberikan kontribusi yang besar, sedangkan yang

mampu mencapai dari target yang telah ditetapkan sebanyak 37 jenis, dengan tingkat pertumbuhan terendah -14,79%.

Berikut ini tabel IV.7 yang memperlihatkan pencapaian pertumbuhan laba usaha daerah setiap tahun dan rata-rata pertumbuhannya dari tahun 2001-2005.

Tabel IV.7
Pertumbuhan Laba Usaha Daerah Propinsi Sumatera Selatan
Tahun 2001-2005

Tahun	Lab a Usaha Daerah	Pertumbuhan (%)
2001	3.556.084.218,05	
2002	4.204.488.368,42	18,23
2003	10.493.730.610,00	149,58
2004	13.695.673.962,00	30,51
2005	16.995.270.899,66	24,09
Rata – rata		44.48

(Sumber :Dispenda Propinsi Sumatera Selatan yang telah diolah)

Berdasarkan tabel IV.7 di atas tampak, selama periode 2001-2005 tingkat pertumbuhan laba usaha daerah Propinsi Sumatera Selatan secara rata-rata sebesar 44,48%. Tahun 2001-2005 menunjukkan penerimaan pemerintah yang berasal dari laba usaha daerah selalu menunjukkan peningkatan setiap tahun, tetapi peningkatan ini juga dibarengi semakin kecil! pertumbuhannya setiap tahun. Tahun 2003 tingkat pertumbuhan naik secara drastis sebesar 149,58%, tingginya tingkat pertumbuhan ini dikarenakan besarnya kontribusi yang berasal dari Bank sumsel dan PD. Minyak dan Gas Bumi melebihi dari target yang tetapkan dan pencapaian realisasi laba usaha daerah tahun 2003 sebesar Rp 6.289.242.241,58, sedangkan pertumbuhan terendah pada tahun 2002 sebesar (18,23%), rendahnya pertumbuhan ini karena kontribusi yang berasal dari Bank Sumsel relatif kecil dan PD. Minyak dan Gas Bumi tidak memberikan kontribusi dan pencapaian realisasi laba usaha daerah meningkat sebesar Rp 648.404.150,37.

Berikut ini tabel IV.8 yang memperlihatkan pencapaian pertumbuhan lain-lain PAD yang sah setiap tahun dan rata-rata pertumbuhannya dari tahun 2001-2005.

Tabel IV.8
Pertumbuhan Lain-lain PAD yang Sah Propinsi Sumatera Selatan
Tahun 2001-2005

Tahun	Lain – lain PAD yang sah	Pertumbuhan (%)
2001	47.399.522.660,20	
2002	56.604.003.968,15	19,42
2003	104.323.915.505,67	84,30
2004	61.072.159.456,63	-41,46
2005	58.434.898.821,32	-4,32
Rata – rata		11,58

(Sumber : Dispenda Propinsi Sumatera Selatan yang telah diolah)

Berdasarkan tabel IV.8 di atas tampak, selama periode tahun 2001-2005 menunjukkan tingkat pertumbuhan yang berasal dari lain-lain PAD yang sah Propinsi Sumatera Selatan secara rata-rata sebesar 11,58%. Tahun 2003 penerimaan pemerintah yang berasal dari lain-lain PAD yang sah targetnya di tingkat, meskipun penerimaannya tidak dapat mencapai target yang ditetapkan, pencapaian realisasi sebesar Rp 104.323.915.505,67 lebih besar dari realisasi tahun 2002 sebesar Rp 56.604.003.968,15. Tingkat pertumbuhan tertinggi pada tahun 2003 (84,30%) tingginya tingkat pertumbuhan ini didukung oleh semakin besarnya realisasi penerimaan pemerintah yang berasal dari jasa giro, sumbangan pihak ketiga, dan sumbangan dana PON XVI tahun 2004, yang lebih besar dari pada tahun 2002, sedangkan pertumbuhan terendah pada tahun 2004 mengalami minus sebesar -41,46% ini dikarenakan jenis penerimaan dari lain-lain PAD yang sah berkurang menjadi 3 jenis yang sebelumnya pada tahun 2002 dan 2003 8

jenis. Jenis lain-lain PAD yang sah yang berkurang yaitu denda keterlambatan pekerjaan daerah, angsuran cicilan/ pelepasan kendaraan, angsuran cicilan rumah dinas dan tanah, sumbangan dana PON XIV tahun 2004, dan penerimaan lain-lain, kemudian tahun 2005 target penerimaan lain-lain PAD yang sah diturunkan menjadi sebesar Rp72.625.126.041,00 lebih kecil dari target yang ditetapkan pada tahun 2004 sebesar Rp 155.132.471.000,00 penurunan target ini dilakukan untuk menyesuaikan jenis penerimaan dari lain-lain PAD yang sah. Tahun 2005 mines realisasi pertumbuhan dapat diminimalisir sebesar -4,32% yang sebelumnya -41,46% ini dikarenakan target yang ditetapkan lebih kecil dengan realisasi mencapai 80,46%.

e. Target dan Realisasi Dana Perimbangan serta Pertumbuhannya

Berikut ini tabel IV.9 yang memperlihatkan pencapaian target dan realisasi serta pertumbuhan dana perimbangan dari tahun 2001-2005.

Tabel IV.9
Target dan Realisasi Serta Pertumbuhan Dana Perimbangan
Propinsi Sumatera Selatan
Tahun 2001 - 2005

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Pertumbuhan (%)
2001	362.606.659.000,00	362.957.015.063,44	100,09	
2002	438.399.655.000,00	438.391.040.538,73	99,99	20,78
2003	503.391.305.000,00	499.942.996.798,66	99,31	14,04
2004	539.937.579.100,00	575.979.889.216,68	106,67	15,21
2005	662.408.838.782,00	786.818.756.365,88	118,78	36,60
Rata – rata			104,97	17,33

(Sumber : Dispenda Propinsi Sumatera Selatan yang telah diolah)

Memperhatikan tabel IV.9 tampak bahwa pencapaian target Dana Perimbangan Propinsi Sumatera Selatan dari tahun 2001-2005 rata-rata sebesar

104,97%. Pencapaian target terendah diperoleh tahun 2003 (99,31%), ini dikarenakan pos bagi hasil bukan pajak sumber daya alam tidak dapat mencapai dari target yang ditetapkan, sedangkan pencapaian target tertinggi diperoleh tahun 2005 (118,78%), ini dikarenakan seluruh target yang ditetapkan dapat tercapai. Tetapi bila dilihat dari pertumbuhan dalam pencapaian target, pertumbuhan dari tahun ke tahun menunjukkan naik turun (fluktuasi), dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 17,33%. Pertumbuhan pencapaian tertinggi terjadi tahun 2005 (36,60%), tingginya tingkat pertumbuhan ini didukung oleh besarnya kontribusi yang berasal dari pos bagi hasil bukan pajak sumber daya alam dengan kontribusi sebesar Rp 107.185.394.033, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2003 (14,04%), rendahnya pertumbuhan ini dikarenakan 7 jenis pos bagi hasil bukan pajak sumber daya alam tidak dapat mencapai dari target yang ditetapkan.

2. Sumber keuangan daerah yang baru yang berpotensi dapat dikembangkan

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bagian perencanaan dan Kepala Bagian Retribusi Daerah bahwa sumber keuangan daerah yang berpotensi untuk dikembangkan yaitu :

a. Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat

Upaya pemerintah Propinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan penerimaan PAD khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat cukup beralasan. Pertama, jika dilihat dari pencapaian realisasi tahun 2005 sebesar Rp1.106.570.885, kemudian tahun 2006 realisasi meningkat sebesar Rp 1.417.939.803,00 berarti mengalami peningkatan sebesar (28,14%). Kedua, dapat dilihat dari pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi,

Kabupaten/Kota dibidang fisik atau infrastruktur seperti pembangunan pelabuhan tanjung siapi-api, pipa nisasi gas ke pulau Jawa, pembangunan *play over*, jalan raya lintas timur, pembangunan perkantoran kabupaten pemekaran, dan perkebunan dll. Untuk melakukan pembangunan tersebut tentunya akan membutuhkan kendaraan alat berat baik milik PT atau milik pemerintah itu sendiri, dengan kondisi yang demikian sumbangsih penerimaan dari pajak kendaraan bermotor alat berat berpotensi untuk dipungut.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Alat Berat

Upaya Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Sumatera Selatan melakukan pembangunan infrastuktur, dengan mengundang investor untuk menanamkan modalnya, tentu saja untuk melakukan pembangunan tersebut para investor menggunakan kendaraan alat berat. Melihat kondis tersebut diharapkan jumlah kendaraan bermotor alat berat akan bertambah, baik kendaraan baru maupun kendaraan asal luar daerah. Atas dasar tersebut untuk meningkatkan Penerimaan dari sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Alat Berat, Pemerintah Propinsi memandang perlu memberikan pengurangan Bea Balik Nama Kendaran Bermotor Alat Berat, untuk kendaraan bernomor polisi luar Propinsi yang memutasikan kendarannya ke Propinsi Sumatera Selatan. Jika dilihat dari pencapain realisasi tahun 2005 sebesar Rp 238.470.760, kemudian tahun 2006 peningkatan sebesar Rp 980.118.250,00 berarti mengalami peningkatan sebesar (311%).

c. Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan

Untuk melaksanakan otonomi daerah Pemerintah Propinsi diberikan peran untuk menggali potensi sumber keungan daerah yang baru, yang berpotensi dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan menetapkan beberapa dinas/unit kerja pengelola untuk menarik pungutan dari subyek orang pribadi atau badan yang melakukan pengurusan administrasi ke instansi pemerintah seperti pengurusan kutipan surat ketetapan PKB/BBN-KB, surat izin trayek, sertifikat mutu, surat izin usaha, surat sertifikat bibit/benih, surat keterangan bibit ikan, surat keterangan pengujian kapal perikanan, sertifikat hasil ujian (SHU), dan rekomendasi surat izin usaha dll. Atas dasar tersebut untuk meningkatkan PAD dari sektor retribusi daerah, pemerintah Propinsi Sumatera Selatan menetapkan retribusi daerah yang baru yaitu retribusi pelayanan jasa ketatausahaan, adapun tujuan retribusi ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

3. Kendala yang dihadapi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan PAD

- a. Sulitnya pencapaian target retribusi daerah karena pemerintah akan menerima imbalan dari retribusi daerah tergantung dengan permintaan atas jasa yang diberikan/dinikmati.

Contoh : Target retribusi rumah sakit yang ditetapkan pemerintah tentunya akan tercapai, jika jumlah pasien yang menderita sakit melakukan pengobatan meningkat/bertambah, tetapi jika pada kondisi tertentu ternyata yang menderita sakit berkurang/menurun, maka akan berdampak pada penurunan

target retribusi karena yang melakukan pengobatan menggunakan fasilitas rumah sakit berkurang, ini menunjukkan bahwa target retribusi daerah bersifat naik turun (fluktuasi).

- b. Masyarakat berupaya menghindari untuk membayar pajak daerah, dengan alasan pajak yang dibebankan oleh pemerintah bagi wajib pajak terlalu mahal.
- c. Hakekat dari retribusi itu sendiri yang sifatnya bukan paksaan, sedangkan pungutan pajak dapat dilakukan secara paksa bagi wajib pajak yang mempunyai tunggakan/ tidak membayar.
- d. Kebocoran/kelolosan retribusi daerah bisa terjadi, karena pungut retribusi daerah diserahkan langsung kepada dinas/instansi terkait yang diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan retribusi kepada masyarakat, karena Dispenda hanya bersifat pengelola.
- e. Penerapan sanksi bagi yang tidak membayar retribusi belum direalisasikan.

4. Upaya yang dilakukan untuk mengelola sumber-sumber keuangan daerah

Upaya yang dilakukan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan sumber keungan daerah ada 2 cara yaitu:

a. Upaya Intensifikasi

Adapun usaha intensifikasi yang dilakukan antara lain:

- 1) Melalui peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 13 tahun 2007 tentang Pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBN-KB II) untuk kendaraan bermotor nomor polisi dalam Propinsi Sumatera Selatan, sebesar

50% diberikan kepada wajib pajak yang mendaftarkan kendaraannya tanggal 2 April 2007 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2007.

- 2) Pemutihan tunggakan pajak misalnya: bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak selama 3 tahun berturut-turut, maka akan diberikan pemutihan selama 2 tahun, kemudian wajib pajak harus membayar 1 tahun pajak yang terhutang disertai dengan denda.
- 3) Penagihan pajak dilakukan secara langsung kepada wajib pajak (*door to door*)
- 4) Melakukan razia kendaraan bermotor bagi pengendara yang tidak membayar pajak.

b. Upaya Ekstensifikasi

Upaya ekstensifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan sumber keuangan daerah yaitu menetapkan Perda Nomor 10 tahun 2006 tentang retribusi pelayanan jasa ketatausahaan.

Adapun obyek retribusi pelayanan jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi yang meliputi penyediaan dan atau pemberian:

- 1) blanko, formulir atau barang cetak lainnya
- 2) surat izin, referensi, rekomendasi, berita acara dan surat-surat keterangan
- 3) petikan, salinan/turunan surat-surat atau peraturan perundang-undangan
- 4) pengesahan peta, gambar, bagan dan cetak biru
- 5) jasa ketatausahaan lainnya

BAB V

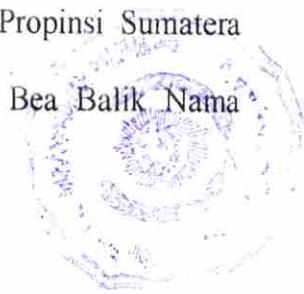
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab empat, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Keadaan dan perkembangan masing-masing sumber keuangan daerah
 - a. Realisasi Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan selama tahun 2001-2005 mengalami peningkatan setiap tahun, dengan persentase rata-rata sebesar 99,53%, sedangkan pertumbuhan mengalami naik turun (fluktuasi), dan pertumbuhan rata-rata sebesar 18,28%.
 - b. Realisasi PAD Propinsi Sumatera Selatan dari tahun 2001-2005 mengalami peningkatan setiap tahun, dengan persentase rata-rata sebesar 113,42%, sedangkan pertumbuhan menunjukkan naik turun (fluktuasi), dan pertumbuhan rata-rata sebesar 22,98%.
 - c. Kontribusi masing-masing jenis PAD terhadap total PAD Propinsi Sumatera Selatan selama tahun 2001-2005, terbesar berasal dari pajak daerah dan pendapatan lain-lain PAD yang sah dengan rata-rata kontribusi sebesar 79,22% dan 17,57%, kemudian disusul oleh laba usaha daerah dan retribusi daerah dengan rata-rata kontribusi masing-masing sebesar 2,22% dan 0,99%.
 - d. Rata-rata pertumbuhan masing-masing jenis PAD Propinsi Sumatera Selatan selama tahun 2001-2005 urutan pertama adalah laba usaha daerah sebesar 44,48% , urutan kedua pajak daerah sebesar 26,26%, urutan ketiga lain-lain

- PAD yang sah sebesar 11,58%, dan terakhir 5,16%. adalah retribusi daerah. Tetapi pertumbuhan ada yang mengalami minus.
- e. Pendapatan daerah Propinsi Sumatera Selatan selama tahun 2001-2005 yang berasal dari dana perimbangan mengalami peningkatan setiap tahun dengan persentase rata-rata sebesar 104,97%, sedangkan pertumbuhan menunjukkan naik turun (fluktuasi) dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 17,33%.
2. Sumber keuangan daerah yang baru berpotensi dapat dikembangkan yaitu
- Pajak Kendaraan Bermotor alat berat
 - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor alat berat
 - Retribusi pelayanan jasa ketatausahaan
3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan PAD antara lain:
- Target retribusi daerah sulit tercapai karena tergantung dengan permintaan atas jasa yang diberikan/dinikmati
 - Masyarakat berupaya menghindar untuk membayar pajak daerah
 - Hakekat dari retribusi itu sendiri sifatnya bukan paksaan
 - Kebocoran/kelolosan retribusi daerah bisa terjadi
 - Penerapan sanksi bagi yang tidak membayar retribusi belum direalisasikan.
4. Upaya yang dilakukan untuk mengelola sumber keuangan daerah ada 2 cara yaitu :
- Upaya intensifikasi yaitu melalui peraturan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBN-KB II)



- b. Upaya ekstensifikasi yaitu menetapkan Perda Nomor 10 Tahun 2006 tentang retribusi pelayanan jasa ketatausahaan.

B. Saran

1. Mengefektifkan pengawasan dan koordinasi untuk menghindari terjadinya kebocoran dan kelolosan karena Dispenda hanya sebagai pengelola, sedangkan yang memungut retribusi daerah yaitu instansi yang diberikan kewenangan untuk menarik pungutan retribusi.
2. Melakukan pendataan bagi wajib pajak/pemilik kendaraan bermotor yang bernomor polisi luar Propinsi Sumatera Selatan yang berdemesili dalam waktu yang lama/tetap, sehingga potensi pungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, bagi wajib pajak yang ingin memutasikan kendaraan dapat diketahui.
3. Mengingat kondisi topografis Propinsi Sumatera Selatan yang mempunyai sungai musir, yang sebagian kecil mobilitas penduduknya menggunakan kendaraan di atas, dengan demikian potensi penarikan Pajak Kendaraan di atas Air dapat ditarik, sehingga perlu dilakukan pendataan dan razia kendaraan di atas air yang tidak membayar pajak, karena kontribusi Pajak Kendaraan di atas Air ke Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan relatif kecil selama tahun 2001-2005.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Tabel Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan daerah Propinsi Sumatera Selatan
2. Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
3. Kartu Aktivitas Bimbingan Usulan Penelitian
4. Surat Keterangan Selesai Riset
5. Sertifikat Membaca Al-Qur'an
6. Biodata Penulis

TABEL
TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
PROPINSI SUMATERA SELATAN
T.A 2001 S.D 2005

No	Uraian	Tahun Anggaran 2001			Tahun anggaran 2002		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	120.963.954.000,00	120.963.954.000,00	100,00	104.543.594.000,00	78.152.654.086,70	74,76
	Jumlah I	120.963.954.000,00	120.963.954.000,00	100,00	104.543.594.000,00	78.152.654.086,70	74,76
2.	Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PAD)						
	Pajak Daerah	143.000.000.000,00	164.856.086.130,62	115,28	173.650.000.000,00	225.791.644.233,27	130,03
	Retribusi Daerah	4.228.700.000,00	3.445.473.774,00	81,48	4.631.037.000,00	3.034.488.584,50	65,53
	Laba BUMD	3.281.733.000,00	3.556.084.218,05	108,36	5.144.942.000,00	4.204.488.368,42	81,72
	Penerimaan Diras-Dinas	-	-	-	-	-	-
	Penerimaan Lain-lain	14.798.064.000,00	47.399.522.660,20	320,31	50.024.288.000,00	56.604.003.968,15	113,15
	Jumlah II	165.308.497.000,00	219.257.166.782,87	132,64	233.450.267.000,00	289.634.625.154,34	124,07
3.	Peir.dapatan Dari Pemerintah						
	Pos Bagi Hasil Pajak	50.313.344.000,00	55.349.416.190,00	110,01	55.694.429.000,00	68.704.041.755,00	123,36
	Pos Bagi Hasil Bukan Pajak	143.524.965.000,00	138.841.776.873,44	96,74	171.175.226.000,00	158.156.998.783,73	92,39
	Pos Dana Rutin / D A U	168.768.350.000,00	168.765.822.000,00	100,00	211.530.000.000,00	211.530.000.000,00	100,00
	Pos Dana Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-
	Jumlah III	362.606.659.000,00	362.957.015.063,44	10,10	438.399.655.000,00	438.391.040.538,73	100,00
	Jumlah I + II + III	648.879.110.000,00	703.178.130.000,71	108,37	776.393.516.000,00	806.178.319.779,77	103,84

(Sumber : Dispenda Propinsi Sumatera Selatan yang telah diolah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2003			Tahun anggaran 2004		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	85.747.620.000,00	113.979.475.486,96	132,92	189.650.788.347,00	189.650.788.347,00	100,00
	Jumlah I	85.747.620.000,00	113.979.475.486,96	132,92	189.650.788.347,00	189.650.788.347,00	100,00
2.	Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PAD)	339.950.449.000,00	428.080.428.852,82	125,92	614.782.613.047,00	493.132.547.174,17	80,21
	Pajak Daerah	195.650.000.000,00	310.116.186.303,66	158,51	427.410.281.047,00	413.657.152.755,87	96,78
	Retribusi Daerah	4.236.883.000,00	3.200.596.433,49	75,54	6.048.847.000,00	4.707.560.999,67	77,83
	Laba usaha daerah	6.770.379.000,00	10.439.730.610,00	154,20	26.191.014.000,00	13.695.673.962,00	52,29
	Lain-lain PAD yang sah	133.293.187.000,00	104.323.915.505,67	78,27	155.132.471.000,00	61.072.159.456,63	39,37
	Bag. Dana Perimbangan	503.391.305.000,00	499.942.996.798,66	99,31	559.937.579.100,00	575.979.889.216,68	106,68
3.	Pos Bagi Hasil Pajak	76.699.769.000,00	117.637.662.277,70	153,37	167.821.716.100,00	155.523.035.693,00	92,67
	Pos Bagi Hasil Bukan Pajak	174.466.946.000,00	130.080.743.520,96	74,56	147.245.863.000,00	195.582.853.523,68	132,83
	Dana Alokasi Umum	231.930.000.000,00	231.930.000.000,00	100,00	224.870.000.000,00	224.874.000.000,00	100,00
	Dana Alokasi Khusus	8.300.000.000,00	8.300.000.000,00	100,00	-	-	-
	Dana Penyeimbang Daerah	11.994.590.000,00	11.994.591.000,00	100,00	19.100.000.000,00	19.101.000.000,00	100,01
	Jumlah	929.089.374.000,00	1.042.002.901.138,44	112,15	1.363.470.980.494,00	1.277.864.224.737,85	93,72

(Sumber: Dispenda Propinsi Sumatera Selatan yang telah diolah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2005		
		Target	Realisasi	%
1.	Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PAD)	566.730.452.778,00	590.776.221.173,35	104,24
	Pajak Daerah	468.066.359.446,00	511.334.751.629,64	109,24
	Retribusi Daerah	5.502.717.291,00	4.011.299.822,73	72,90
	Laba usaha daerah	20.536.250.000,00	16.995.270.899,66	82,76
	Lain-lain PAD yang sah	72.625.126.041,00	58.434.898.821,32	80,46
2.	Bag. Dana Perimbangan	662.408.838.782,00	786.818.756.365,88	118,78
	Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak	419.701.838.782,00	544.111.756.365,88	129,64
	Dana Alokasi Umum	242.707.000.000,00	242.707.000.000,00	100,00
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-
	Dana Penyeimbang Daerah	-	-	-
	Lain-lain pendapatan yang sah	10.491.000.000,00	10.491.000.000,00	100,00
	Penerimaan pembiayaan	23.850.580.000,00	23.346.425.054,77	97,89
	Jumlah	1.263.480.871.560,00	1.388.085.977.539,23	111,71

(Sumber: Dispenda Propins; Sumatera Selatan yang telah diolah)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. **Akuntansi Sektor Publik**, Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- , dan Jamal Abdul Nasir. 2006. **Kajian Tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang**, Jurnal Usahawan, Nomor 06 TH XXXV Juni, hal 42-53.
- Alimad Yani. 2006. **Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia**, PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Dasril Munir, Henry Arsy Djuanda, Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2004. **Kebijakan Dan Manajemen Keuangan Daerah**, Penerbit YPAPI, Yogyakarta.
- Keputusan Mendagri R.I No. 29 Tahun 2002 Tentang Pengurus Pertanggung Jawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Pengawasan Penyusunan Dan Perhitungan APBD.2002**. Penerbit BP.Panca Usaha, Jakarta.
- Mohamad Mahsun. 2006. **Pengukuran Kinerja Sektor Publik**, Edisi Pertama, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Marihot P. Siahaan. 2006. **Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah**, Edisi 1-2, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. **Akuntansi Sektor Publik**, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Nan Lin Ahli Bahasa W. Gulo. 2002. **Metode Penelitian**, PT. Grasiado, Jakarta.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2002. **Metode Penelitian**, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Sugiyono. 2003. **Metode Penelitian Bisnis**, cetakan kelima, CV. ALFABETA, Bandung.
- Suparmoko.2003. **Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah**, Edisi Pertama, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**. 2001. Harvindo, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah**. 2004. Cetakan ketujuh, Penerbit Citra Umbara, Bandung.



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Radius Prawira Negara	PEMBIMBING
NIRM/NIM : 22 2003 056	KETUA : Drs. Sunardi, SE.,M.Si.
JURUSAN : Akuntansi	ANGGOTA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN TENTANG PENERIMAAN DAERAH PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN	

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	05-My. 2006	Up	<i>[Signature]</i>		
2	13-01-07	Bab I II	<i>[Signature]</i>		Kocher
3		Bab I, II	<i>[Signature]</i>		Pulver
4	25-01-07	Bab F. II	<i>[Signature]</i>		nee, Pulver, Gant, had
5	31-01-07	Bab III. IV	<i>[Signature]</i>		Pulver
6	02-02-07	Bab III. W	<i>[Signature]</i>		Pulver
7	24-04-07	Bab W	<i>[Signature]</i>		Pulver.
8	07-05-07	Bab IV.	<i>[Signature]</i>		Pulver.
9	12-05-07	Bab IV	<i>[Signature]</i>		nee
10	18-05-07	Bab V	<i>[Signature]</i>		Pulver
11	07-07-07	Bab V	<i>[Signature]</i>		nee
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Di keluaran di : Palembang
Pada tanggal : 6 / 1 / 2007



Di Bekan
Ketua Jurusan.
8/07
01
Ladewi, SE.,M.Si.



KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN USULAN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : RADIUS PRAWIRA NEGARA PEMBIMBING
 NIM : 22 2003 056 KETUA : Drs. SUNARDI, SE., M.Si
 JURUSAN : AKUNTANSI ANGGOTA :

UDUL USULAN PENELITIAN : KAJIAN TENTANG KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

NO	TGL/BULAN/TAHUN	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1		Pro Up	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
2		Pro up	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
3	12-12-06	up	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
4	16-12-06	up	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
5	18-12-06	up	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
6					
7					
8					
9					
10					

Tanggal Seminar yang disepakati :

Di keluarkan : Palembang
Pada Tgl :

Daftar Mahasiswa Peserta Seminar
Yang dibawah oleh Pemakalah

Dekan
 Ketua Jurusan
[Signature] 18/12/06
 Ni Yuniyah Ladewi, SE., M.Si

No	Nama Mahasiswa	NIM	Tanda Tangan
	IZAM KALIMADI	22.2003.010	<i>[Signature]</i>
	M ALI AFRAP	22.2001.097	<i>[Signature]</i>
	Fauko Rahmad	22.2003.050	<i>[Signature]</i>
	Lindo Ardiansyah	22.2003.080	<i>[Signature]</i>
	Anna. Fenahny	22.2003.066	<i>[Signature]</i>
	Suhur Linawati	22.2003.108	<i>[Signature]</i>
	Nissa Fosita	22.2004.069	<i>[Signature]</i>
	API AFRANISAH	22.2000.051	<i>[Signature]</i>
	HERA MARETA	22.2002.073	<i>[Signature]</i>
	APRIZAL	22.2002.015	<i>[Signature]</i>

CATATAN :

- * Usulan Penelitian di Seminarkan setelah mendapat persetujuan dari Anggota dan Ketua Pembimbing
- * Kartu Bimbingan Skripsi akan diberikan setelah Seminar dan Perbaikan Usulan Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH

JALAN POM IX KAMPUS TELEPON 310633
PALEMBANG

Palembang, 15 Januari 2007

Nomor : 423.4/000030 /Penda
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Bantuan Data

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Plg.
di

Palembang

Memenuhi Surat Saudara Nomor : 420/G-17/FE-UMP/XI1/2006 tanggal 16 Desember 2006 perihal Mohon Bantuan Data, dengan ini disampaikan bahwa kami tidak berkeberatan untuk memberikan data/keterangan kepada Mahasiswa yang bernama **Radius Prawira Negara** Nim 22 2003 056 tersebut sepanjang untuk bahan kajian ilmiah dan tidak untuk disebarluaskan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

WAKIL KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



MARWAN SOBRIE, SE. MM
PEMBINA TK I NIP. 010221435



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH

JALAN POM IX KAMPUS TELEPON 310633
PALEMBANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 112 Tahun 2007

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Marwan Sobrie, SE.MM**
Nomor Induk Pegawai (NIP) : 010 221 435
Pangkat/Golongan : Pembina Tk I (Gol. IV/b)
Jabatan : Wakil Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Radius Prawira Negara**
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 222 003 056
Jurusan/Program Studi : Ekonomi
Mahasiswa : Universitas Muhammadiyah Palembang

Telah selesai melaksanakan penelitian di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penulisan Skripsi di Universitas Muhammadiyah Palembang dengan Judul "Kajian Tentang Penerimaan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 27 Juni 2007

WAKIL KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



MARWAN SOBRIE, SE.MM
PEMBINA TK I NIP. 010 221 435

Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Palembang

SERTIFIKAT

Nomor : 058 /J-10/FE-UM/IX/ 2006

بسم الله الرحمن الرحيم

Diberikan Kepada :

Nama : **RAPILUS PRANIRA NEGARA**

NIM : **22 2003 056**

Jurusan : Akuntansi

Yang dinyatakan LULUS mengikuti ujian kemampuan membaca Al-Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 23 NOVEMBER 2006 M.
02 BULANADAH 1427 H

A.n. **DARMAWIYAN**
Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang IV,
Palembang

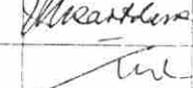


[Signature]
Hidayatuddin, S.E., Ak., M.Si

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Rabu, 08 Agustus 2007
Waktu : 13.00 WIB
Nama : **RADIUS PRAWIRA NEGARA**
NIM : 22 2003 056
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Pemerintahan
Judul Skripsi : **KAJIAN TENTANG PENERIMAAN DAERAH
PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN**

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING
SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. Sunardi, SE. M.Si	Pembimbing	13-08-07	
2.	DR. Sa'adah Siddik, SE. Ak. M.Si	Ketua Penguji	15-8-07	
3.	Mizan, SE. M.Si	Anggota Penguji I	16/8-2007.	
4.	Drs. Sunardi, SE. M.Si	Anggota Penguji II	13-08-07	

Palembang, 25 Agustus 2007
An. Dekan
Ketua Jurusan Akuntansi


Hj. Y. Hanis Ladewi, SE., M.Si

Biodata Penulis

Nama Lengkap : Radius Prawira Negara

Tempat/ Tanggal Lahir : Tes, 10 Oktober 1984 (Bengkulu)

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Raya Air Dingin No. 19 Kab Lebong
(Bengkulu)

No HP : 085268544644

Nama orangtua :

1. Ayah : M. Syahri. A
2. Ibu : Dahniar

Pekerjaan Orangtua

1. Ayah : Petani
2. Ibu : Petani

Alamat Orangtua : Jl. Raya Air Dingin No. 19 Kab Lebong
(Bengkulu)